



Pendidikan Kewarganegaraan: Wahana Pengembangan Kompetensi Warganegara Dalam Pengenalan Partisipasi Politik Siswa Sekolah Dasar

Irwan Efendi¹

Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Djuanda
Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Ciawi Bogor 16720

Volume 7 Nomor 2
Oktober 2020: 149-162
DOI: 10.30997/dt.v7i2.2635

Article History

Submission: 22-06-2020

Revised: 29-07-2020

Accepted: 11-09-2020

Published: 29-10-2020

Kata Kunci:

Pendidikan Kewarganegaraan, partisipasi politik, kompetensi kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan

Keywords:

Citizenship Education, political participation, citizenship competence, citizenship knowledge

Korespondensi:

Irwan Efendi

(irwanefendi49@yahoo.co.id)

Abstrak: Demokrasi pada dasarnya harus didukung dengan praktik partisipasi politik warga negara baik dalam memengaruhi pengambilan, mengkritisi, dan pelaksanaan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Partisipasi politik sesungguhnya dilandasi oleh kesadaran politik dan kepercayaan terhadap sistem politik yang dianut oleh warga negara yang bermoral dan bertanggungjawab. Hal tersebut melandasi perlunya peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pengembangan *civic competences* yakni *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* untuk mengenalkan partisipasi politik pada diri siswa Sekolah Dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan peranan Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pengembangan pengenalan partisipasi politik siswa Sekolah Dasar melalui pengembangan kompetensi kewarganegaraan di lingkungan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *desk study* dimana data diperoleh melalui teknik studi pustaka yang kemudian diperiksa dan dianalisis menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sarana yang tepat untuk mengembangkan kompetensi kewarganegaraan dalam proses pengenalan partisipasi politik siswa Sekolah Dasar. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa praktik Pendidikan Kewarganegaraan mendorong siswa Sekolah Dasar untuk mampu mencapai tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yakni mendorong peserta didik menjadi warga negara yang memahami partisipasi politik baik dari sudut pandang konsep maupun praktik yang bertanggungjawab dalam kehidupannya.

Citizenship Education: A Media for Citizen Competence Development in Introduction to Political Participation of Elementary School Students

Abstract: Democracy must be supported by the practice of citizen political participation in influencing, criticizing, and implementing decisions taken by the government. Political participation is based on political awareness and belief in the political system adopted by moral



and responsible citizens. This underlies the need for the role of Citizenship Education as a means of developing civic competencies, namely civic knowledge, civic skills, and civic disposition to introduce political participation in elementary school students. This study aims to reveal the role of Citizenship Education in developing the introduction of political participation of elementary school students through the development of civic competence in the surrounding environment. This study uses a qualitative approach with a desk study method where data is obtained through literature study techniques which are then examined and analyzed using secondary data. The results of the study show that Citizenship Education is the right means to develop civic competence in the process of introducing political participation to elementary school students. Based on these findings, it is concluded that the practice of Citizenship Education encourages elementary school students to be able to achieve the goals of Citizenship Education, which is to encourage students to become citizens who understand political participation both from the point of view of responsible concepts and practices in their lives

PENDAHULUAN

Realita demokrasi dimaknai sebagai kebebasan yang sebebaskan-bebasnya seperti tidak memiliki aturan main yang baik. Bahkan seringkali kebebasan mengemukakan pendapat dalam bentuk demonstrasi berakhir dengan anarkis dan pengusakan-pengusakan terhadap fasilitas umum. Oleh karena itu, praktik demokratisasi di Indonesia yang sesungguhnya menekankan pada partisipasi utuh warga negara secara cerdas dan bertanggungjawab masih dipertanyakan. Banyak juga kasus-kasus yang menunjukkan terjadinya penyelewengan praktik demokrasi salah satunya dalam pemilihan umum. Ketidakpuasan para kandidat pemilihan umum dan pendukungnya terkait proses dan hasil pemilihan

umum tidak jarang menjadi pemicu timbulnya demonstrasi yang berakhir dengan tindakan kekerasan. Hal tersebut sesungguhnya merupakan faktor yang mengakibatkan luntarnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan berpengaruh pula terhadap partisipasi politik masyarakat. Permasalahan tersebut pula yang dilihat langsung oleh siswa Sekolah Dasar khususnya melalui pemberitaan media massa. Baik disadari maupun tidak apa yang siswa lihat dan amati melalui media massa tersebut secara tidak langsung membentuk persepsi dirinya terhadap sistem politik dan praktik partisipasi politik di Indonesia. Rendahnya perhatian terhadap fakta tersebut justru akan mengikis rasa percaya siswa terhadap praktik politik

di Indonesia. Siswa Sekolah Dasar yang notabene adalah warga negara dan generasi penerus bangsa tentunya sangat mengkhawatirkan sekali bila sejak dini dirinya menjadi warga negara yang skeptis terhadap praktik politik dan enggan berpartisipasi politik. Pembiaran terhadap kondisi tersebut justru akan melemahkan praktik demokrasi itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar sebagai bagian dari mata pelajaran dengan tujuan membentuk warga negara yang baik, demokratis, berkarakter dan mewujudkan cita-cita demokrasi dalam membangun bangsa Indonesia sesungguhnya merupakan sarana yang tepat digunakan untuk mengenalkan partisipasi politik pada siswa. Pendidikan Kewarganegaraan yang mengembangkan partisipasi politik merupakan modal dasar bagi siswa itu sendiri agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik dan mampu berperan aktif dalam partisipasi politik yang bertanggungjawab demi tercapainya cita-cita demokrasi yang baik. Berdasarkan hal tersebut, peranan Pendidikan Kewarganegaraan di

Sekolah Dasar, menengah pertama dan atas perlu dilakukan pengintegrasian agar pengenalan dan pemahaman terhadap partisipasi politik baik yang sifatnya teoritis maupun bagaimana praktik politik yang bertanggungjawab itu dilaksanakan oleh siswa dilingkungannya. Keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan pemahaman siswa mengenai partisipasi politik sesungguhnya dapat dilihat dari capaian siswa terhadap kompetensi kewarganegaraan yaitu *civic knowledge*, *civic disposition*, dan *civic skills* dalam partisipasi politik yang bermutu dan bertanggungjawab. Hal ini sebagaimana pernyataan Branson (Branson, 1999a) yang mengungkapkan bahwa *civic education* bertujuan untuk mengembangkan partisipasi yang berkualitas dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik masyarakat baik di tingkat lokal dan nasional. Adapun sesungguhnya partisipasi itu sendiri tidak hanya dimaknai sebagai keikutsertaan semata, tetapi merujuk pada keikutsertaan yang dilandasi oleh implementasi kompetensi kewarganegaraan yaitu penguasaan terhadap pemahaman mengenai partisipasi

politik, penguasaan terhadap partisipasi politik yang dilandasi oleh sikap mental dan komitmen tinggi dalam menjunjung nilai serta prinsip dasar demokrasi.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pengenalan partisipasi politik melalui pengembangan kompetensi warga negara yaitu pengetahuan, keterampilan dan karakter pada siswa Sekolah Dasar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *desk-study* untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang kemudian akan dianalisis menggunakan data sekunder yakni dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kompetensi kewarganegaraan dan partisipasi politik. Penggunaan metode tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang dapat dikaji guna mengungkapkan peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pengembangan kompetensi warga negara dalam paya pengenalan

partisipasi politik siswa Sekolah Dasar. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang terjun langsung ke lapangan guna menggali dan mengumpulkan informasi terkait dengan fokus penelitian. Hal ini sebagaimana pernyataan Moleong (Moleong, 2017) bahwa pada penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen utama penelitian karena dirinya berperan dalam segala proses penelitian baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis hingga mendeskripsikan temuan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik validitas data yaitu triangulasi, *member check* dan menggunakan bahan referensi. Hal ini sebagaimana pendapat Creswell (Creswell, 2007) bahwa pengujian terhadap keakuratan data harus digunakan beragam strategi untuk memperoleh data yang valid. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman (Miles et al., 2009) yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL & PEMBAHASAN

Pendidikan Kewarganegaraan pada penelitian ini merujuk pada peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran di tingkat dasar yang mengembangkan kompetensi kewarganegaraan sebagai pengenalan dasar mengenai partisipasi politik di lingkungan sekitar siswa. Mengingat bahwa partisipasi politik harus didasarkan pada pemahaman dan tanggungjawab sebagai warga negara, maka pada praktiknya kompetensi kewarganegaraan menjadi indikator untuk mengetahui hasil capaian pemahaman partisipasi politik tersebut. Kompetensi kewarganegaraan dalam berpartisipasi politik pada dasarnya terbagi dalam tiga aspek yaitu *civic knowledge*, *civic skills* dan *civic disposition*.

Civic knowledge mengarah pada pengetahuan yang harus dikuasai oleh warga negara mengenai hak dan kewajibannya terkait dengan peranan dirinya sebagai bagian dari demokrasi sehingga memiliki hak dan kewajiban dalam partisipasi politik. Adapun *civic skill* merujuk pada kecakapan intelektual dan kecakapan partisipasi. *Civic skills* ini pada dasarnya

merupakan implementasi dari pengetahuan yang telah dimiliki sehingga pengetahuan tersebut menjadi hal yang bermakna. Pada praktiknya *civic skill* meliputi keterampilan berpikir kritis dalam mengambil keputusan serta mampu berperan aktif dalam partisipasi politik yang bertanggungjawab. Kompetensi kewarganegaraan yang terakhir yaitu *civic disposition* yang merupakan karakter kewarganegaraan. Karakter kewarganegaraan tersebut meliputi karakter tanggungjawab moral, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, disiplin serta berpikir terlebih dahulu dalam membuat keputusan. *Civic disposition* ini menjadi faktor yang mendukung efektivitas pelaksanaan partisipasi politik yang sehat dan bertanggungjawab. Branson (Branson, 1999b) merinci *civic disposition* dalam dua bentuk karakter yaitu karakter publik dan karakter privat. Karakter publik meliputi keterampilan berpikir kritis, bernegosiasi, kesopanan serta mengindahkan aturan. Sedangkan karakter privat meliputi penghargaan terhadap nilai manusia sebagai individu dan warga negara, tanggungjawab moral serta disiplin.

Branson menjelaskan bahwa penguasaan terhadap *civic disposition* dalam berpartisipasi politik akan mewujudkan kesuksesan proses demokrasi sebagaimana yang diharapkan. Disisi lain ada pula Quigley, Buchanan, dan Bahmueller (Quigley et al., 1991) yang memaparkan bahwa *civic disposition* adalah bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Hal ini karena *civic disposition* akan mewujudkan fungsi sosial yang sehat dalam mewujudkan cita-cita demokrasi melalui partisipasi politik.

Berkaitan dengan paparan diatas, antara partisipasi politik dengan kompetensi kewarganegaraan memiliki keterkaitan yang erat. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan aktivitas warga negara yang dapat mempengaruhi keputusan politik. Adapun sesungguhnya partisipasi politik bersifat sukarela sehingga sangat pribadi. Oleh sebab itu penting sekali penguasaan kompetensi kewarganegaraan dalam berpartisipasi politik. Milbrath dan Goel (Sastroatmodjo, 1995) mengungkapkan bahwa setidaknya partisipasi politik itu sendiri dapat dibedakan dalam empat jenis, yaitu: apatis, spektator, gladiator,

dan pengkritik. Masing-masing bentuk partisipasi politik tersebut sangat dipengaruhi oleh kesediaan pribadi, pemahaman mengenai praktik partisipasi politik yang harus dilakukannya serta persepsi dirinya terhadap sistem politik itu sendiri. Milbrath dan Goel menyatakan bahwa apatis merupakan sikap warga negara yang menarik diri dari proses politik dan enggan untuk berpartisipasi politik, spektator merupakan warga negara yang turut berpartisipasi politik tetapi hanya sekedar ikut memilih saja dalam pemilihan umum, gladiator merupakan warga negara yang terlibat aktif dalam jalannya proses politik bahkan warga negara dengan tipe gladiator ini memegang peranan besar dalam mengawal jalannya keberlangsungan proses politik. Adapun tipe pengkritik merupakan warga negara yang terlibat dalam partisipasi politik tetapi dalam bentuk tak konvensional.

Mengingat bahwa partisipasi politik berkaitan erat dengan keikutsertaan warga negara dalam proses politik, maka bila kita telaah lebih lanjut sesungguhnya praktik dari partisipasi politik itu banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Partisipasi politik tidak hanya merujuk pada praktik pemilihan umum pemimpin negara saja tetapi juga kegiatan-kegiatan yang mencerminkan demokrasi serta pengambilan keputusan bersama termasuk dalam partisipasi politik. Pada kehidupan peserta didik Sekolah Dasar baik disadari maupun tidak dirinya kerap terlibat dalam partisipasi politik seperti pemilihan ketua kelas dan pemilihan pemimpin kelompok belajar. Berkaitan dengan hal tersebut, Huntington dkk (Huntington et al., 1990) menyatakan bahwa salah satu bentuk dari partisipasi politik adalah kegiatan pemilihan dimana anggota memberikan suaranya untuk menentukan siapa yang akan menduduki suatu jabatan.

Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wadah pengembangan kompetensi kewarganegaraan dalam mengenalkan partisipasi politik merupakan upaya untuk membangun warga negara yang memiliki pengetahuan politik partisipan. Almond dan Powell (Budimansyah, 2008) mengemukakan bahwa budaya politik partisipan merupakan orientasi warga negara yang terbuka dan mau memenuhi hak dan kewajibannya

dalam proses politik seperti memberikan suaranya saat pemilihan. Namun tentu budaya politik partisipan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan ikut-ikutan saja, tetapi didasari pula oleh pertimbangan yang matang dalam keikutsertaannya. Oleh karena itu, penguasaan kompetensi kewarganegaraan menjadi hal yang perlu dimiliki oleh peserta didik di sekolah dalam mengenali partisipasi politik dan sebagai modal bagi dirinya menjadi bagian dari warga negara berbudaya politik partisipan. Sebagai mana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa kompetensi kewarganegaraan meliputi tiga aspek yaitu pengetahuan, keterampilan dan karakter. Pengembangan kompetensi kewarganegaraan tersebut di sekolah harus memfasilitasi peserta didik untuk memiliki pemahaman yang benar mengenai proses politik Indonesia dan bagaimana peranan dirinya sebagai warga negara dalam berpartisipasi politik, bagaimana praktik partisipasi politik dilingkungan sekitarnya yang dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta dibekali dengan pemahaman mengenai nilai dan karakter ideal dalam berpartisipasi politik. Hal tersebut menunjukkan

adanya pengembangan terpadu dari kompetensi kewarganegaraan yang membekali peserta didik Sekolah Dasar tidak hanya pada tataran pengenalan proses politik saja tetapi konsep teoritis mengenai partisipasi politik. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan pentingnya mengenalkan peranan politik yang ideal kepada peserta didik di Sekolah Dasar sebagai tindakan nyata dalam membentuk warga negara yang aktif dalam kehidupan berpolitik. Hal tersebut sesungguhnya sejalan dengan pemikiran Cogan dan Kerr (Winataputra & Budimansyah, 2007) tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik sebagai warga muda untuk berperan aktif dan bertanggungjawab sebagai warga negara. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi kewarganegaraan dalam pengenalan partisipasi politik pada siswa Sekolah Dasar merupakan upaya mencapai tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat dasar dalam menciptakan *good citizens* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pemenuhan hak dan kewajibannya dalam partisipasi politik.

Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pengenalan partisipasi politik pada siswa Sekolah Dasar guna mengembangkan kesadaran politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pengembangan kompetensi kewarganegaraan turut diperkuat pula oleh Almond dan Verba (Almond & Verba, 1989) yang menyatakan bahwa pendidikan secara umum (didalamnya terdapat Pendidikan Kewarganegaraan) akan meningkatkan kesadaran warga negara bahwa pengaruh pemerintah terhadap dirinya begitu besar. Hingga kemudian dirinya sebagai warga negara akan memiliki kecenderungan untuk mengikuti politik, untuk mendapatkan informasi politik, memperkaya wawasan dengan menganalisis opini-opini dan masalah politik, hingga dirinya terlibat aktif dalam diskusi politik. Hal tersebut kemudian akan terinternalisasi dalam diri warga negara untuk turut serta berkontribusi dalam memecahkan masalah politik, aktif menjadi anggota organisasi politik, berpikiran terbuka dan berorientasi pada pencapaian cita-cita demokrasi serta mendorong masyarakat di lingkungan sekitarnya untuk turut serta

aktif berpartisipasi politik secara bertanggungjawab dan beretika.

Peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks pengembangan partisipasi politik siswa Sekolah Dasar pada praktiknya mendorong masyarakat dalam hal ini merujuk pada siswa sebagai generasi penerus bangsa dan bagian dari masyarakat memiliki budaya komunitas politik yang tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana komunitas politik tersebut dijalankan dan dibangun oleh warga negara yang cerdas dan bertanggungjawab terhadap perilaku politiknya. Oleh sebab itu, pengenalan partisipasi politik melalui Pendidikan Kewarganegaraan sesungguhnya merupakan langkah yang memfasilitasi peserta didik di Sekolah Dasar untuk melek politik, tidak hanya tahu tapi juga mampu memahami fungsi dan peranan dirinya sebagai warga negara dalam proses politik melalui pemenuhan partisipasi politik di lingkungan sekitarnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Quigley (Quigley, 2000) menyatakan bahwa *civic participation* berkaitan erat dengan *constitutional democracy* yang praktis tergantung pada partisipasi yang cerdas dari warga

negara karena kebijakan-kebijakan pemerintah diukur dan ditentukan oleh keputusan pemilih, dan karena pemerintahan yang terbatas akan tetap terbatas hanya apabila ada keberanian warga negara untuk mencegah atau memprotes penyimpangan etika dan penyimpangan konstitusional. Dengan kata lain siswa Sekolah Dasar yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi politik dan kemungkinannya untuk merasa bahwa adalah kewajiban dirinya sebagai seorang warga negara untuk berpartisipasi dalam politik.

Pada praktiknya keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengenalkan partisipasi politik melalui pengembangan keterampilan kewarganegaraan akan sangat dipengaruhi oleh peranan pendidik sebagai fasilitator kegiatan belajar mengajar. Oleh sebab itu, pendidik harus merancang praktik Pendidikan Kewarganegaraan bermuatan pendidikan politik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik Sekolah Dasar yang kaya akan nilai-nilai, karakter, menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dalam partisipasi politik. Praktik pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan

dengan muatan pendidikan politik yang tepat tentu mendorong peserta didik mencapai kompetensi kewarganegaraan sebagai dasar bagi dirinya dalam berpartisipasi politik. Hal tersebut sesungguhnya selaras dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ditingkat persekolahan yakni memfasilitasi peserta didik sebagai warga negara yang siap mengemban peranan dirinya sebagai warga negara dalam proses politik salah satunya dilingkungan sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut, para pendidik Pendidikan Kewarganegaraan dapat mentransfer kompetensi kewarganegaraan secara bertahap dan disesuaikan dengan cakupan kebutuhan peserta didik Sekolah Dasar agar menjadi *politically literate individual* dalam berpartisipasi politik. Capaian pengenalan partisipasi politik pada diri siswa Sekolah Dasar dapat dianalisis mengacu pada sejumlah ciri yaitu berprinsip kepribadian yang mandiri, sadar akan sejumlah haknya, memiliki rasa tanggungjawab akan kewajiban-kewajiban, mampu berpartisipasi secara aktif, kreatif, konstruktif dan

demokratis, dan menghayati nilai-nilai dasar kemasyarakatan (Cohen, 2010).

Disadari bahwa peran Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya hanya pada aspek psiko-pedagogis saja tetapi juga pada sosio-kultural yang seyogianya didesain sedemikian rupa guna mentransformasikan nilai-nilai budaya politik partisipasi pada diri siswa. Oleh sebab itu, pengenalan budaya politik partisipasi menjadi hal yang juga harus diberikan kepada peserta didik Sekolah Dasar. Pemahaman bahwa dirinya merupakan anggota dari kehidupan politik yang menyadari ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi serta dilaksanakan merupakan bagian dari pemenuhan sosio-kultural Pendidikan Kewarganegaraan bermuatan pendidikan politik pada diri siswa. Dengan demikian peserta didik dalam melaksanakan partisipasi politik tidak akan menerima keputusan politik tanpa pertimbangan. Hal ini karena dirinya sadar bahwa ia sebagai anggota politik turut memiliki peranan dalam menentukan dan menjalankan politik demi kepentingan bersama. Pemahaman, keterampilan dan karakter kewarganegaraan yang terbangun dalam dirinya akan menjadi prinsip

yang mengakar kuat sehingga ia tidak akan mudah dimobilisasi oleh pihak lain yang bertentangan dengan apa yang diyakininya.

Adapun sarana pengembangan partisipasi politik di tingkat Sekolah Dasar sebenarnya banyak dialami oleh peserta didik. Namun tanpa penguasaan pengajaran yang tepat justru akan menghambat pemenuhan hak dan kewajiban dalam berpartisipasi politik. Berkaitan dengan hal tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi wadah untuk membentuk sikap yang berdasarkan pada etika politik tak tertulis. Lebih jauh dari itu, pengembangan partisipasi politik melalui pendidikan kewarganegaraan pun menjadi jalan bagi pendidik untuk mentransformasi nilai-nilai politik pada diri siswa. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dilihat peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai agen sosialisasi politik yang memfasilitasi siswa untuk memahami fenomena politik di lingkungan tempat dirinya tinggal. Sosialisasi politik disini pun meliputi pengenalan mengenai nilai dan norma politik yang dianut oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya. Praktik sosialisasi politik tersebut akan

mendorong siswa untuk sadar politik, memenuhi hak dan kewajibannya, dan mampu berpartisipasi politik.

Berkaitan dengan paparan tersebut diatas, Pendidikan Kewarganegaraan ditingkat Sekolah Dasar berkontribusi pada pengembangan pemahaman mengenai sistem politik baik sebagai kerangka berpikir dalam mengambil keputusan maupun sebagai landasan dalam diskusi umum. Dalam konteks ini menegaskan peranan dan tanggungjawab Sekolah Dasar untuk dalam memperkuat kebajikan warga negara dan kesadaran sebagai warga negara dan membantu siswa untuk melihat kesesuaiannya dari aspek kewarganegaraan dalam kehidupannya melalui Pendidikan Kewarganegaraan dan pengembangan kompetensi kewarganegaraan.

Tetapi perlu diingat bahwa dalam paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan, apalagi hubungannya dengan partisipasi politik bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bukanlah sebuah indoktrinasi politik dan siswa bukan obyek pembelajaran melainkan sebagai subyek dari pembelajaran itu sendiri. Hal ini selaras dengan pendapat Suryadi (Suryadi & Somantri, 200 C.E.)

bahwa Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada empat hal *Pertama*, Pendidikan Kewarganegaraan saat ini bukan diarahkan sebagai indoktrinasi politik. *Kedua*, Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan *state of mind*, pembangunan karakter bangsa melalui proses pembentukan warga negara yang cerdas serta berdaya nalar tinggi. Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pengenalan partisipasi politik siswa pun mengarahkan dirinya untuk membentuk *civic intelligence*, *civic responsibility*, dan *civic participation* peserta didik Sekolah Dasar sebagai dasar bagi siswa untuk menjalankan peranannya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. *Ketiga*, Pendidikan Kewarganegaraan adalah merujuk pada proses pencerdasan berpartisipasi politik, karena itu pendekatan yang digunakan dalam Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendekatan yang mendorong siswa untuk partisipatif berdasarkan nalar dan logikanya. *Keempat*, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sarana laboratorium demokrasi dimana sikap,

perilaku, pemikiran demokratis siswa perlu dikembangkan melalui partisipasi politik.

Disamping itu, dalam memahami peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengenalan partisipasi politik pun perlu pula difahami posisi Pendidikan Kewarganegaraan agar praktik pengenalan partisipasi politik melalui pengembangan kompetensi kewarganegaraan di Sekolah Dasar tercapai optimal. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tiga peran yaitu *psycho-paedagogical development* yakni peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pemberdaya peserta didik sebagai warga muda untuk menjadi warga negara yang baik, cerdas intelektual dan berkarakter mulai. Peran yang kedua yaitu *socio-cultural development*, melalui peranan ini Pendidikan Kewarganegaraan memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasi dirinya untuk aktif berpartisipasi politik secara bertanggungjawab. Peranan ketiga yaitu *socio-political intervention* yaitu peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pendidikan politik yang dikemas sedemikian rupa untuk mendorong peserta didik memahami

sistem politik, terampil mempraktikkan kompetensi kewarganegaraan dalam berpartisipasi politik di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Tiga peranan tersebut dapat diwujudkan secara optimal manakan pendidikan dan lingkungan sekolah mampu mewujudkan kelas sebagai laboratorium demokrasi, lingkungan sekolah sebagai *micro cosmos of democracy* dan masyarakat tempat dimana siswa tinggal sebagai *open global classroom*. Tiga aspek tersebut memfasilitasi siswa Sekolah Dasar tidak hanya memahami konsep demokrasi saja tetapi dapat pula menyukseskan demokrasi melalui pemenuhan hak dan kewajibannya dalam berpartisipasi politik. Oleh sebab itu, proses Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengenalkan partisipasi politik akan mengarahkan siswa Sekolah Dasar menjadi warga negara yang demokratis. Partisipasi politik yang siswa laksanakan pun akan memenuhi syarat dasar dari partisipasi itu sendiri yaitu sukarela, otonom dan beorientasi pada tercapainya cita-cita bersama.

SIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan ujung tombak bagi pembentukan generasi muda sebagai warga negara yang baik. Hal ini selaras dengan tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana mempersiapkan warga muda untuk siap mengambil peranannya dalam proses politik. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sarana yang tepat untuk mengenalkan partisipasi politik yang dilandasi oleh penguasaan kompetensi kewarganegaraan pada diri siswa Sekolah Dasar. Kompetensi kewarganegaraan dalam pengenalan partisipasi politik meliputi tiga aspek yaitu *civic competence*, *civic skill* dan *civic disposition*. Ketiga kompetensi tersebut melandasi praktik partisipasi politik siswa baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Pemahaman terhadap konsep dan praktik dari partisipasi politik menjadi modal dasar bagi siswa untuk menjadi warga negara yang melek politik, sadar dirinya berarti dalam menentukan keputusan politik serta mampu aktif berpartisipasi politik secara bertanggungjawab. Pengenalan partisipasi politik melalui pengembangan kompetensi kewarganegaraan pada

dasarnya merupakan perwujudan dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yakni menciptakan komunitas masyarakat tahu politik, demokratis dan menjunjung tinggi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam berpartisipasi politik. Oleh sebab itu perlunya adanya penguatan, pembiasaan dan pengintegrasian mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi mengenai peranannya siswa terhadap partisipasi politik agar kelak siswa mampu berperan serta dalam proses politik yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Verba, S. (1989). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. SAGE Publications.
- Branson, M. S. (1999a). *Belajar Civic Education dari Amerika*. LKiS.
- Branson, M. S. (1999b). *Making the Case for Civic Education: Where We Stand at the End of the 20th Century*. Center for Civic Education.
- Budimansyah, D. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Cohen, A. (2010). A Theoretical Model of Four Conceptions of Civic Education. *Canadian Social Studies*, 44.
- Creswell, J. W. (2007). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781849208956>
- Huntington, S. P., Simamora, S., & Nelson, J. M. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Rineka Cipta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2009). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. UI Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Quigley, C. N. (2000). Global Trends in Civic Education. *Seminar for the Needs for New Indonesian Civic Education*.
- Quigley, C. N., Buchanan, J. J. H., & Bahmueller, C. F. (1991). *Civitas: A Framework for Civic Education*. Center for Civic Education.
- Sastroatmodjo, S. (1995). *Perilaku Politik*. IKIP Semarang Press.
- Suryadi, A., & Somantri. (200 C.E.). *Pemikiran ke Arah Rekayasa Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. The International Seminar: The Need for New Indonesian Civic Education*.
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2007). *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas*. Prodi PKn SPS UPI.